

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2025

KPU Pakpak Bharat

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

KPU Pakpak Bharat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Pakpak Bharat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Salak, 30 April 2026

Sekretaris



POSMA E.H. SITUMEANG, SH
NIP. 198508252009021004



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Jl. Lae Ordi No.28 A Salak

Telp. 0627- 7433000

email : kpu_pakpakbharat@kpu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPU Pakpak Bharat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode Tahunan (*Audited*) Tahun 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Salak, 30 April 2026



POSMA E.H. SITUMEANG, SH
NIP.198503252009021004

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan KPU Pakpak Bharat Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.644.494 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp15.644.494 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.624.317.900 atau mencapai 99,49 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4.647.910.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp408.001.671 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp7.333.333; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp5.541.750; Aset Tetap (neto) sebesar Rp395.126.588 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp16.411.000 dan Rp391.590.671

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.644.494 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp4.849.908.749 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-4.834.264.255, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-4.834.264.255.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp5.482.021.478, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-4.834.264.255 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar - 3.673.425.308 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 3.417.258.756 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp391.590.671

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	15.644.494	-	80.111.130
JUMLAH PENDAPATAN		-	15.644.494	-	80.111.130
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	3.103.672.000	3.085.917.832	99,43	2.439.313.683
Belanja Barang	B.2.2	1.496.286.000	1.490.507.268	99,61	17.998.408.229
Belanja Modal	B.2.3	47.952.000	47.892.800	99,88	366.454.800
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		4.647.910.000	4.624.317.900	99,49	20.804.176.712

Salak, 30 April 2026
 Sekretaris

POSMA E.H. SITUMEANG, SH
NIP. 198503251009021004

NERACA				
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024				
U R A I A N		Catatan	2025	2024
ASET				
ASET LANCAR				
	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	4.870.381.708
	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	7.333.333	39.083.328
	Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
	Piutang Perpajakan	C.7	-	-
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
	Piutang Bukan Pajak	C.9	-	-
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	C.12	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan	C.13	-	-
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	C.14	-	-
	Persediaan	C.15	-	-
	Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
	Jumlah Aset Lancar		7.333.333	4.909.465.036
PIUTANG JANGKA PANJANG				
	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	C.17	6.157.500	-
	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
	Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	(615.750)	-
	Jumlah Piutang Jangka Panjang		5.541.750	-
PROPERTI INVESTASI				
	Properti Investasi	C.21	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
ASET TETAP				
	Tanah	C.23	-	-
	Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
	Peralatan dan Mesin	C.25	2.018.396.237	1.970.503.437
	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
	Gedung dan Bangunan	C.27	-	-
	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	-	-
	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
	Aset Tetap Lainnya	C.31	-	-
	Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(1.623.269.649)	(1.397.946.995)
	Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
	Jumlah Aset Tetap		395.126.588	572.556.442
ASET LAINNYA				
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
	Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
	Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
	Aset Lain-lain	C.42	-	-
	Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	-	-
	Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET			408.001.671	5.482.021.478
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				

Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	16.411.000	4.430.720
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		16.411.000	4.430.720
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		16.411.000	4.430.720
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	391.590.671	5.477.590.758
JUMLAH EKUTAS		391.590.671	5.477.590.758
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		408.001.671	5.482.021.478

Salak, 30 April 2026

Sekretaris



POSMA E.H. SITUMEANG, SH
NIP.198503252009021004

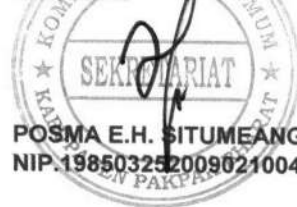
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	15.644.494	40.784.530
Jumlah Pendapatan		15.644.494	40.784.530
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	3.102.328.832	2.439.313.683
Beban Persediaan	D.4	-	517.441.962
Beban Barang dan Jasa	D.5	1.063.148.763	14.412.170.857
Beban Pemeliharaan	D.6	56.082.000	46.865.000
Beban Perjalanan Dinas	D.7	403.026.500	3.394.251.500
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	225.322.654	223.597.401
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Rincian Khusus Beban dalam rangka penanganan covid-19	D.12	-	-
Jumlah Beban		4.849.908.749	21.033.640.403
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(4.834.264.255)	(20.992.855.873)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	(9.588.936)
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	78.076.600
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	68.487.664
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(4.834.264.255)	(20.924.368.209)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(4.834.264.255)	(20.924.368.209)

Salak, 30 April 2026
Sekretaris



POSMA E.H. SITUMEANG, SH
NIP.198503252009021004

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	5.482.021.478	7.346.677.436
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(4.834.264.255)	(20.924.368.209)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
	E.4	(3.673.425.308)	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	(3.673.425.308)	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		(3.673.425.308)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	3.417.258.756	19.059.712.251
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(5.090.430.807)	(1.864.655.958)
EKUITAS AKHIR	E.6	391.590.671	5.482.021.478

Salak, 30 April 2026

Sekretaris



POSMA E.H. SITUMEANG, SH

NIP. 198503252009021004

Profil dan Kebijakan Teknis

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

UUD 1945 pasal 22 E menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri." Amanat konstitusi tersebut adalah untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Bagian Ketiga, Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU pada Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 menjelaskan secara umum yaitu :

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum (PEMILU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
2. Menyelenggarakan Pemilu Presiden.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Pada Pasal 11 disebutkan mengenai tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pada Pasal 13 disebutkan mengenai tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Untuk mewujudkan KPU sebagai lembaga yang memiliki integritas dan kredibilitas dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektif, telah disusun Rencana Strategi (Renstra) KPU Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang bersifat riset kepemiluan;
 - b. Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik;
 - c. Indeks Reformasi Birokrasi;
 - d. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetap tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - e. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
3. Mewujudkan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai; dan
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

A.2 Lokasi dan Profil KPU Pakpak Bharat

KPU Kabupaten Pakpak Bharat berada di Jl. Lae Ordi No 28 A, Desa Salak I, Kecamatan Salak. KPU Pakpak Bharat masih menggunakan Gedung Pinjam Pakai Milik Sekolah SMP Negeri 1 Salak, karena sampai saat ini belum mendapat kan Tanah Hibah Pemerintah Daerah sehingga belum bisa membangun Gedung Kantor milik sendiri.

1. KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

a. Susunan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di ibukota Kabupaten, sedangkan pada Pasal 6 dijelaskan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota adalah sebanyak 5 (lima) orang. Kelima anggota ini terdiri atas ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota, yang pada periode 2023 – 2028, susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut :

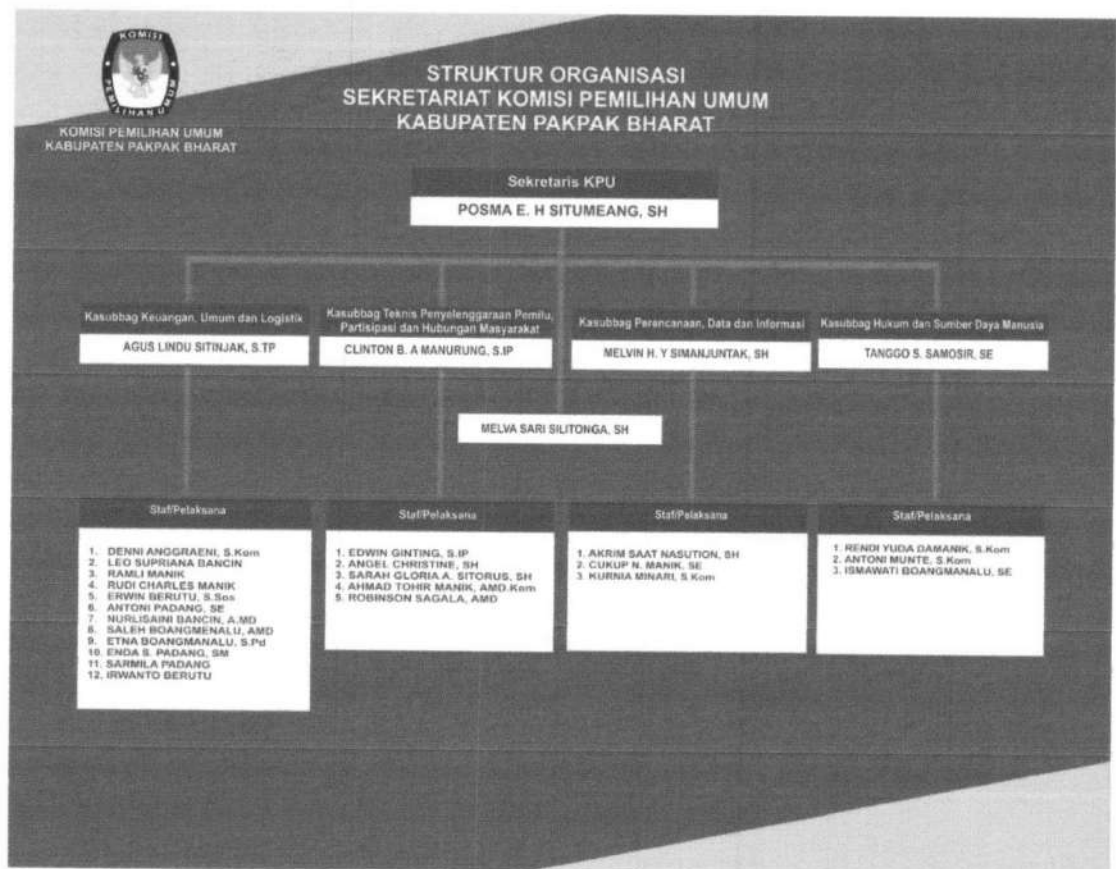
- Ketua : Basra Munthe
- Anggota : Ahmad Karliza Berutu
- Anggota : Lakitang Lubis
- Anggota : Tridah Lulun Dapt Berutu
- Anggota : Welly Imron Cibro

b. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat

Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat. Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat saat ini dijabat oleh Posma Elisa Haryanto Situmeang, SH, Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari 4 (empat) orang Eselon IV.a / Kepala Subbagian yang terdiri dari :

- Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik;
- Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- Kasubbag Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- Kasubbag Hukum dan SDM.

c. Struktur Organisasi



Tugas-tugas KPU Kabupaten/Kota yang bersifat teknis administratif dilaksanakan oleh Sekretariat yang terdiri dari Pegawai ASN sebanyak 24 (dua puluh empat) Orang dan PPNPN sebanyak 5 (lima) Orang, sedangkan tugas-tugas yang bersifat kebijakan (policy) terkait pemilihan dilaksanakan oleh anggota KPU. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Pegawai, Sekretariat Jenderal KPU terus melakukan rekrutmen CPNS sejak Tahun 2007 dan Rekrutmen PPNPN oleh KPU Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, KPU secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan pembinaan personil dan menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis di segala bidang, baik yang dilakukan oleh KPU sendiri maupun dengan mengikutsertakan pada program diklat yang diselenggarakan oleh instansi lain.

2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Visi

Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas.

b. Misi

Merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut :

- Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- Menyusun peraturan di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien serta transparan, akuntabel dan aksesibel;
- Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilihan dalam Pemilu; dan
- Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.

c. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- Menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, tepat waktu, efisien, efektif; dan
- Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;

d. Sasaran Strategis Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2024 – 2029 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis untuk tujuan pertama yaitu Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas, yaitu :

- Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat;
- Tersedianya sistem informasi Partai Politik yang andal serta berkualitas; dan
- Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga Komisi Pemilihan Umum yang berkualitas.

Sasaran Strategis untuk tujuan kedua yaitu Menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, tepat waktu, efisien, efektif, yaitu :

- Terwujudnya pendidikan pemilih pemilihan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran Strategis untuk tujuan ketiga yaitu Mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yaitu terwujudnya pemilu dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

3. NILAI-NILAI DASAR DAN LINGKUP TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban, segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum, mengemban nilai-nilai dasar yaitu : integrasi, profesionalitas, mandiri, transparan dan akuntabel.

a. **Memiliki integritas**

Seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum baik anggota maupun sekretariat harus memiliki integritas yang tinggi dalam mengemban tugasnya. Hal ini terkait dengan peran KPU yang merupakan gerbang dalam rangka mencari sosok pemimpin nasional dan wakil rakyat yang memiliki kapabilitas, kredibilitas, dan akseptabilitas serta merupakan kunci pertama untuk mencari kepemimpinan nasional yang bertanggung jawab terhadap amanah yang diembannya.

b. **Profesionalitas**

Seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum secara konsisten dan berkelanjutan sambil berbenah diri dengan berbagai upaya yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembenahan dalam rekrutmen untuk menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional dan berkualitas.

c. **Mandiri**

Dalam alam demokrasi yang terus berkembang menuntut penyelenggara pemilu yang mandiri, artinya bebas dari intervensi politik dan pemerintahan. Proses pemerintahan diharapkan berjalan tanpa dipengaharui atau dimanfaatkan untuk kepentingan kemenangan pemilu.

d. **Transparan**

Komisi Pemilihan Umum dengan segenap jajarannya telah bertekad untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada publik yang membutuhkan mengenai semua aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

e. **Akuntabel**

Seluruh proses penyelenggaraan dan hasil pemilu harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPU Pakpak Bharat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

*Basis
Akuntansi*

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dari KPU Pakpak Bharat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2.284.082.000	3.103.672.000
Belanja Barang	1.780.208.000	1.496.286.000
Belanja Modal	-	47.952.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	4.064.290.000	4.647.910.000

Realisasi Pendapatan
Rp15.644.494

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.644.494 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan KPU Pakpak Bharat terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp15.644.494. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Kenaikan PNPB Lainnya tersebut merupakan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya berupa Hasil Lelang Penjualan Peralatan dan Mesin yang sudah tidak digunakan dalam operasional kantor sebesar Rp15.644.494 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	15.644.494	-
Jumlah	-	15.644.494	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 80,47 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	15.644.494	80.111.130	(80,47)
Jumlah	15.644.494	80.111.130	(80,47)

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2025 sebesar 0,00 dari TA 2024 Tidak terdapat Rincian Pendapatan Pajak pada periode pelaporan. Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp15.644.494

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp15.644.494 dan Rp80.111.130. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami penurunan sebesar 80,47 dari TA 2024 Kenaikan PNPB Lainnya tersebut merupakan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya berupa Hasil Lelang Penjualan Peralatan dan Mesin serta Arsip yang sudah tidak digunakan dalam operasional kantor sebesar Rp15.644.494. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	15.644.494	80.111.130	(80,47)
Jumlah	15.644.494	80.111.130	(80,47)

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	37.664.100	(100,00)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	15.644.494	-	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	40.784.530	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.662.500	(100,00)
Jumlah	15.644.494	80.111.130	(80,47)

B.2 Belanja

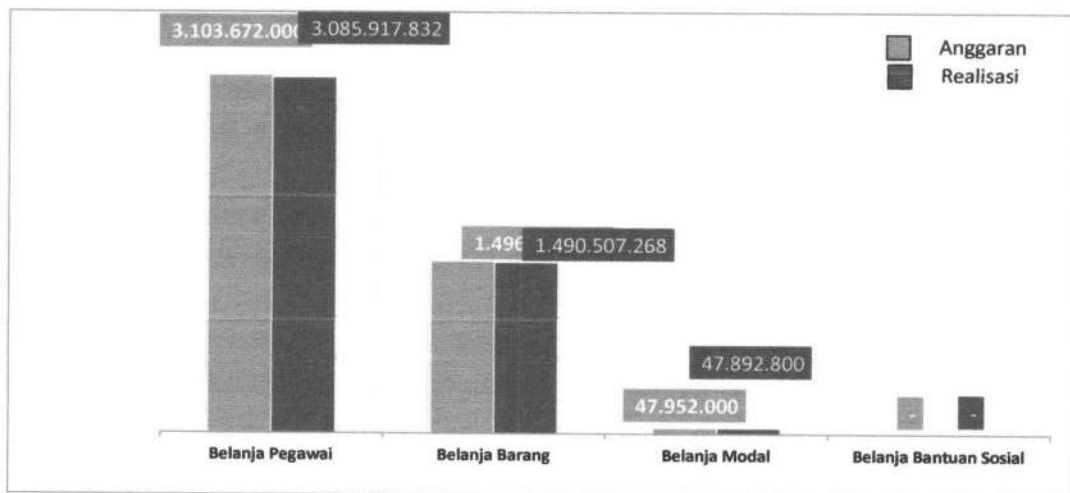
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp4.624.317.900 atau 99,49 % dari anggaran belanja sebesar Rp.4.647.910.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	3.103.672.000	3.085.917.832	99,43
Belanja Barang	1.496.286.000	1.490.507.268	99,61
Belanja Modal	47.952.000	47.892.800	99,88
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	4.647.910.000	4.624.317.900	99,49

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 77,77% Realisasi Belanja pada Tahun Berjalan Mengalami Kenaikan, Kenaikan tersebut terdiri dari Belanja Pegawai Tahun Berjalan disebabkan adanya Kenaikan Pangkat Pegawai, Penambahan CPNS sebanyak 5 (lima) Orang dan Penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 8 (delapan) Orang, Penurunan Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal pada Tahun Berjalan dibanding Tahun Sebelumnya disebabkan oleh Pelaksanaan Efisiensi Anggaran Kebutuhan Belanja Barang dan Modal pada Anggaran Rutin termasuk Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang masih dilaksanakan pada Tahun 2025. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	3.085.917.832	2.439.313.683	26,51
Belanja Barang	1.490.507.268	17.998.408.229	(91,72)
Belanja Modal	47.892.800	366.454.800	(86,93)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	4.624.317.900	20.804.176.712	(77,77)

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.085.917.832 dan Rp2.439.313.683. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 26,51 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Berjalan dibanding Tahun Sebelumnya disebabkan adanya Kenaikan Pangkat Pegawai, Penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 5 (lima) Orang dan Penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 8 (delapan) Orang

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	659.897.000	565.542.500	16,68
Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.225	7.905	42,00
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	38.842.150	37.995.640	2,23
Belanja Tunj. Anak PNS	13.802.078	13.615.616	1,37
Belanja Tunj. Struktural PNS	47.880.000	47.880.000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	7.560.000	7.560.000	-
Belanja Tunj. PPh PNS	3.266.223	3.474.357	(5,99)
Belanja Tunj. Beras PNS	37.006.620	34.471.920	7,35
Belanja Uang Makan PNS	124.041.000	84.561.000	46,69
Belanja Tunjangan Umum PNS	21.805.000	15.330.000	42,24
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845.344.500	842.035.500	0,39
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	233.181.532	57.664.800	304,37
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.748	328	1.042,68
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	11.749.546	320.360	3.567,61
Belanja Tunjangan Anak PPPK	3.018.513	64.072	4.611,13
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	25.200.000	9.720.000	159,26
Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.901.020	1.448.400	721,67
Belanja Uang Makan PPPK	50.975.000	9.065.000	462,33
Belanja Tunjangan Umum PPPK	5.400.000	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	725.462.211	647.819.341	11,99
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) PP	219.570.466	60.737.700	261,51
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	3.085.917.832	2.439.314.439	26,51
Pengembalian Belanja Pegawai	-	756	(100,00)
Jumlah Belanja	3.085.917.832	2.439.313.683	26,51

Realisasi Belanja
Barang
Rp1.490.507.268

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.490.507.268 dan Rp17.998.408.229. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 91,72% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Penurunan Realisasi Belanja Barang pada Tahun Berjalan dibanding Tahun Sebelumnya disebabkan oleh Pelaksanaan Efisiensi Anggaran pada Kebutuhan Belanja Barang Rutin Termasuk juga pada Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang masih dilaksanakan pada tahun 2025

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	92.110.000	142.400.000	(35,32)
Belanja Barang Non Operasional	880.534.500	13.925.324.523	(93,68)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	190.120.877	(100,00)
Belanja Jasa	56.002.268	327.737.591	(82,91)
Belanja Pemeliharaan	56.082.000	46.865.000	19,67
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	405.778.500	3.394.251.500	(88,05)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.490.507.268	18.026.699.491	(91,73)
Pengembalian Belanja	-	28.291.262	(100,00)
Jumlah Belanja	1.490.507.268	17.998.408.229	(91,72)

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2025

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
		-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Rp47.892.800

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp47.892.800 dan Rp366.454.800. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 86,93% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Pada Periode Laporan.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.892.800	366.454.800	(86,93)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	47.892.800	366.454.800	(86,93)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	47.892.800	366.454.800	(86,93)

Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Tidak terdapat Kenaikan atau Penurunan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Berjalan dibanding Tahun Sebelumnya.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp47.892.800 dan Rp366.454.800, mengalami penurunan sebesar 86,93 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Terdapat Penurunan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada periode berjalan disebabkan karena Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024 lebih besar dibandingkan pada periode berjalan yaitu berupa Peralatan dan Mesin kebutuhan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.892.800	366.454.800	(86,93)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	47.892.800	366.454.800	(86,93)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	47.892.800	366.454.800	(86,93)

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Tidak terdapat Kenaikan atau Penurunan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan dibanding Tahun Sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Tidak terdapat Kenaikan atau Penurunan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan dibanding Tahun Sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Tidak terdapat Kenaikan atau Penurunan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Berjalan dibanding Tahun Sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja
Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial Tidak terdapat Kenaikan atau Penurunan Realisasi Belanja Barang Tahun Berjalan dibanding Tahun Sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Tidak terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran pada periode pelaporan

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4.870.381.708. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Tidak terdapat Kas lainnya dan setara Kas

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid) Rp7.333.333

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp7.333.333 dan Rp39.083.328. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	7.333.333,00	39.083.328,00
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	7.333.333	39.083.328

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Pada Tahun 2025 KPU Pakpak Bharat Memiliki 3 Gedung sewa yaitu : 1. Sewa Gudang Logistik Tahun Anggaran 2024, sesuai SPK Nomor 206/RT.08-PKS/1215/2024 tanggal 18 April 2024 Rp16.000.000 dengan jangka waktu selama 12 Bulan, terhitung mulai 1 Mei 2024 s.d 30 April 2025 dan pada 30 April 2025 masa sewa sudah selesai dan digantikan dengan menyewa gudang yang baru sesuai SPK Nomor : 530/KPA/1215/2025 tanggal 21 April 2025 Rp 22.000.000,- dengan masa sewa selama 12 bulan, terhitung mulai 1 Mei 2025 s.d 30 April 2026 sehingga pada 31 Desember 2025 terdapat Beban dibayar dimuka selama 4 bulan sebesar Rp 7.333.333,-. 2. Sewa Gudang Penyimpanan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024, sesuai SPK Nomor 343/PPK/1215/2023 tanggal 2 Oktober 2023 Rp20.000.000 dengan jangka waktu selama 24 Bulan, terhitung mulai 02 Oktober 2023 s.d 30 September 2025 sehingga pada 31 Desember 2025 masa sewa sudah selesai. 3. Sewa Gudang Pemilihan Umum Tahun 2024, sesuai SPK Nomor 347/PPK/1215/2023 tanggal 2 Oktober 2023 Rp70.000.000,- dengan jangka waktu selama 24 Bulan, terhitung mulai 02 Oktober 2023 s.d 30 September 2024 sehingga pada 31 Desember 2025 masa sewa sudah selesai.

Uang Muka Belanja
(prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

Tidak terdapat uang muka belanja pada periode pelaporan

Pendapatan yang Masih
Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

Tidak terdapat Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada periode pelaporan

Piutang Perpajakan Rp0 **C.7 Piutang Perpajakan**

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Perpajakan Rp0*

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

*Piutang Bukan Pajak
Rp0*

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak Rp0

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Bahan Baku	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan tersebut di atas dalam Tidak terdapat persediaan pada periode laporan

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2025. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
2			
3			
4			
Jumlah		-	-

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi
Rp6.157.500

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6.157.500 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka
Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih-Piutang Jgk
Panjang Rp615.750

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp615.750 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	6.157.500	10%	615.750
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	6.157.500		615.750
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	6.157.500		615.750

Properti Investasi Rp0

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Akumulasi Penyusutan
Properti Investasi Rp0

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut Tidak terdapat Kenaikan Nilai Tanah pada periode pelaporan. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
Mutasi kurang :	-
Transfer Keluar	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			-

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tidak terdapat Tanah yang dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga pada periode pelaporan

Tanah Belum Diregister
Rp0

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin
Rp2.018.396.237

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp2.018.396.237 dan Rp1.970.503.437. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	1.970.503.437
Mutasi tambah:	
Pembelian	47.892.800
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	2.018.396.237
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1.623.269.649)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	395.126.588

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

1. Laptop Acer Travelmate P214 Core 15 1 unit @Rp18.392.700 sebesar Rp18.392.700.
2. Laptop Axioo Mybook Pro k5 Core 15 2 unit @ Rp12.308.050 sebesar Rp24.616.100.
3. Device Meja Kantor 1/2 Biro/Kayu Solid 2 Unit @Rp2.442.000 sebesar Rp4.884.000.

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Tidak terdapat Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin pada periode pelaporan
-
-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp0

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak terdapat Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan pada periode pelaporan
-
-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak terdapat Mutasi kurang Gedung dan Bangunan pada periode pelaporan
-
-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	-

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak terdapat Mutasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan pada periode pelaporan

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak terdapat Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan pada periode pelaporan

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp0

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut Tidak terdapat Aset Tetap Lainnya. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi tambah/kurang:

Tidak terdapat Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Lainnya pada periode pelaporan

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Tidak terdapat Konstruksi dalam Pengerjaan pada periode pelaporan Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
	-
	-

Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp1.623.269.649

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp1.623.269.649 dan Rp1.397.946.995. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.018.396.237	(1.623.269.649)	395.126.588
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		2.018.396.237	(1.623.269.649)	395.126.588

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Konsesi Jasa Rp0

C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kemitraan Dengan
Pihak Ketiga Rp0

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Tidak terdapat Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada periode pelaporan. Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Audited) Tahun 2025

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada KPU Pakpak Bharat berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :
Tidak terdapat Penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Tidak terdapat ATB dalam pengerjaan. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
Dana Lainnya	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

Tidak terdapat Rincian Dana Dibatasi Penggunaannya pada periode pelaporan

Dana Cadangan
Perwakilan RI di Luar
Negeri Rp0

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

Tidak terdapat Dana Cadangan Perwakilan RI pada periode pelaporan

Aset Lain-lain Rp0

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

- Tidak terdapat mutasi tambah Aset Lain-lain pada periode pelaporan

-

-

Mutasi Kurang

- Tidak terdapat mutasi kurang Aset Lain-lain pada periode pelaporan

-

-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang
Belum Diregister Rp0

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 0

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
Total	-	-	-

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp16.411.000

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp16.411.000 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	16.411.000	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	16.411.000	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Kepada Pihak Ketiga pada periode pelaporan adalah berupa Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bulan Desember Tahun 2025 untuk 6 Pegawai yang belum dibayarkan sampai per 31 Desember 2025 karena Pagu Anggaran tidak mencukupi dan Pengesahan Usulan Revisi belum keluar sampai dengan tanggal akhir pengusulan pengajuan Tunjangan Kinerja di KPPN

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Tidak terdapat Utang Yang Belum Ditagihkan pada periode pelaporan

Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

tidak terdapat hibah yang belum disahkan pada periode pelaporan

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Rp0

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Tidak terdapat Utang Kelebihan Pembayaran Pada Periode Pelaporan

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp0

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Tidak terdapat pendapatan diterima dimuka pada periode pelaporan

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Terdapat Uang Muka dari KPPN pada periode pelaporan

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Tidak terdapat utang jangka pendek lainnya pada periode pelaporan

Kewajiban Konsesi Jasa
Rp0

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Tidak terdapat utang jangka pendek lainnya pada periode pelaporan

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp391.590.671. dan Rp5.482.021.478. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh Tidak terdapat Pendapatan Perpajakan/Bea Cukai pada periode pelaporan. Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp15.644.494

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp15.644.494 dan Rp40.784.530. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 61,64. Hal tersebut disebabkan oleh PNBP tersebut merupakan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya berupa Hasil Lelang Penjualan Peralatan dan Mesin serta Arsip yang sudah tidak digunakan dalam operasional kantor sebesar Rp15.644.494. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	15.644.494	-	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	40.784.530,00	(100,00)
	-	-	-
Jumlah	15.644.494,00	40.784.530,00	(61,64)

Beban Pegawai
Rp3.102.328.832

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.102.328.832 dan Rp2.439.313.683.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 27,18 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Kenaikan Beban Pegawai pada tahun berjalan disebabkan adanya Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Penambahan CPNS sebanyak 5 (lima) Orang dan Penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 8 (delapan) Orang. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	659.897.000	565.542.500	16,68
Beban Pembulatan Gaji PNS	11.225	7.149	57,01
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	38.842.150	37.995.640	2,23
Beban Tunj. Anak PNS	13.802.078	13.615.616	1,37
Beban Tunj. Struktural PNS	47.880.000	47.880.000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	7.560.000	7.560.000	-
Beban Tunj. PPh PNS	3.266.223	3.474.357	(5,99)
Beban Tunj. Beras PNS	37.006.620	34.471.920	7,35
Beban Uang Makan PNS	124.041.000	84.561.000	46,69
Beban Tunjangan Umum PNS	21.805.000	15.330.000	42,24

Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	845.344.500	842.035.500	0,39
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	233.181.532	57.664.800	304,37
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.748	328	1.042,68
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	11.749.546	320.360	3.567,61
Belanja Tunjangan Anak PPPK	3.018.513	64.072	4.611,13
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	25.200.000	9.720.000	159,26
Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.901.020	1.448.400	721,67
Belanja Uang Makan PPPK	50.975.000	9.065.000	462,33
Belanja Tunjangan Umum PPPK	5.400.000	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	725.462.211	647.819.341	11,99
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) PPP	235.981.466	60.737.700	288,53
	-	-	-
Jumlah	3.102.328.832	2.439.313.683	27,18

Beban Persediaan Rp0

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp517.441.962

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Tidak Terdapat Kenaikan/Penurunan Beban Persediaan pada periode pelaporan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan bahan baku	-	517.441.962	(100,00)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	-	517.441.962	(100,00)

Beban Barang dan Jasa
Rp1.063.148.763

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.063.148.763 dan Rp14.412.170.857.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 92,62 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan Beban Barang dan Jasa pada Tahun Berjalan disebabkan oleh Pelaksanaan Efisiensi Anggaran Pada Anggaran Rutin termasuk juga pada Pelaksanaan Tahapan Pemilihan serentak Tahun 2024 yang masih dilaksanakan pada Tahun 2025. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	31.330.000	45.072.000	(30,49)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	60.960.000	64.312.800	(5,21)
Beban Barang Operasional Lainnya	-	26.900.000	(100,00)
Beban Bahan	163.842.982	2.963.078.738	(94,47)
Beban Honor Output Kegiatan	506.625.000	6.868.305.000	(92,62)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	211.643.518	4.101.764.723	(94,84)
Beban Langganan Listrik	9.338.299	7.616.807	22,60
Beban Langganan Air	995.000	-	-
Beban Sewa	53.749.995	61.000.005	(11,89)
Jumlah	1.063.148.763	14.412.170.857,00	(92,62)

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp56.082.000 dan Rp46.865.000.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 19,67 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan Meningkatnya Kebutuhan Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) pada Tahun Berjalan Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.850.000	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.232.000	46.865.000	(5,62)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	56.082.000	46.865.000	19,67

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp403.026.500 dan Rp3.394.251.500

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 88,13 persen disebabkan oleh Penurunan Beban Perjalanan Dinas pada Tahun Berjalan Disebabkan karena Pelaksanaan Efisiensi Anggaran Rutin termasuk Anggaran Hibah pada Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang masih dilaksanakan pada Tahun 2025. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	384.756.500	2.368.163.500	(83,75)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.270.000	603.278.000	(96,97)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	422.810.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	403.026.500,00	3.394.251.500	(88,13)

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Tidak terdapat Beban Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat pada Periode Laporan. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh Tidak terdapat Beban Bantuan sosial pada periode pelaporan. Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp225.322.654

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp225.322.654 dan Rp223.597.401.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	225.322.654	223.597.401	0,77
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Di	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Penyusutan	225.322.654	223.597.401	0,77
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	225.322.654	223.597.401	0,77

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNPB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp-9.588.936

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	(9.368.936,00)	(100)
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-	(220.000,00)	(100)
Jumlah	-	(9.588.936)	(100)

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp78.076.600.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	37.664.100,00	(100,00)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	38.750.000,00	(100)
	-	-	-
Jumlah	-	78.076.600	(100,00)

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

Tidak terdapat pos pos luar biasa pada periode pelaporan

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Audited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Tidak terdapat Beban Penanganan Covid - 19 pada periode laporan

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp5.482.021.478,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.5.482.021.478,00 dan Rp.7.346.677.436,00

Defisit LO
Rp.4.834.264.255,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.4.834.264.255,00 dan Rp.20.924.368.209,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-3.673.425.308 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp-*
3.673.425.308,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-3.673.425.308,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	(3.673.425.308)
	-
Jumlah	(3.673.425.308,0)

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Tidak terdapat koreksi atas Reklasifikasi pada Periode berjalan

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari Tidak terdapat Revaluasi pada Tahun Berjalan

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Koreksi ini Tidak terdapat Nilai Aset Non Revaluasi pada Tahun Berjalan

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah Tidak Terdapat Koreksi Lain-lain pada Tahun Berjalan. Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Penyesuaian Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp3.417.258.756

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.3.417.258.756 dan Rp.19.059.712.251. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.427.361.500
Diterima dari Entitas Lain	(15.644.494)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	5.541.750
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	3.417.258.756

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 3.427.361.500, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 15.644.494

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp5.541.750 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Transfer Masuk	KPU Kabupaten Simalungun	5.541.750
-	-	-
Jumlah		5.541.750

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 9.377.925.200 dari total Rp9.377.925.200 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	Uang	9.377.925.200
-	-	-
Total Pengesahan		9.377.925.200,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		9.377.925.200

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.391.590.671,00 dan Rp.5.482.021.478,00.

Ekuitas Akhir
Rp391.590.671

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Pada Tanggal 31 Desember 2025 tidak terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran.

2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Tidak terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025.

3. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Pada Tahun 2025 KPU Pakpak Bharat Memiliki 3 Gedung sewa, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sewa Gudang Logistik Tahun Anggaran 2024, sesuai SPK Nomor 206/RT.08-PKS/1215/2024 tanggal 18 April 2024 Rp16.000.000 dengan jangka waktu selama 12 Bulan, terhitung mulai 1 Mei 2024 s.d 30 April 2025 dan pada 30 April 2025 masa sewa sudah selesai
- Sewa Gudang Penyimpanan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024, sesuai SPK Nomor 343/PPK/1215/2023 tanggal 2 Oktober 2023 Rp20.000.000 dengan jangka waktu selama 24 Bulan, terhitung mulai 02 Oktober 2023 s.d 30 September 2025 sehingga pada 30 September 2025 masa sewa sudah selesai.
- Sewa Gudang Pemilihan Umum Tahun 2024, sesuai SPK Nomor 347/PPK/1215/2023 tanggal 2 Oktober 2023 Rp70.000.000,- dengan jangka waktu selama 24 Bulan, terhitung mulai 02 Oktober 2023 s.d 30 September 2024 sehingga pada 30 september 2025 masa sewa sudah selesai.
- Pada tanggal 21 April 2025 KPU Pakpak Bharat menyewa gudang yang baru sesuai SPK Nomor : 530/KPA/1215/2025 tanggal 21 April 2025 Rp 22.000.000,- dengan masa sewa selama 12 bulan, terhitung mulai 1 Mei 2025 s.d 30 April 2025 sehingga pada 31 Desember 2025 terdapat Beban dibayar dimuka selama 4 bulan sebesar Rp 7.333.333,-.

4. Piutang Jangka Panjang

Terdapat Piutang Jangka Panjang berupa Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi atas Pembayaran Honorarium TIM Kelompok Kerja Pada Satker KPU Kabupaten Simalungun sebesar Rp6.157.500, berdasarkan LHP BPK RI Tahun 2017 an. Tanggo Sintong Samosir yang di pidahkan ke KPU Kabupaten Pakpak Bharat karena yang bersangkutan sudah di mutasikan/promosi ke Satker KPU Kabupaten Pakpak Bharat. Yang bersangkutan telah diberikan Surat Penagihan ke 2 (dua) dengan Nomor 656/KU.06.3-SD/1215/2025 tanggal 31 Desember 2025. Diberikan kesempatan untuk membayar secara angsuran selama 31 (tiga puluh satu) kali angsuran dengan jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 30 setiap bulan.

5. Kewajiban Jangka Pendek

Terdapat Kewajiban Jangka Pendek Pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp16.411.000 yaitu berupa Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bulan Desember Tahun 2025 untuk 6 Orang yang belum dibayarkan karena Pagu Anggaran tidak mencukupi, dan telah dibayarkan pada tanggal 22 Januari 2026 dengan SPM Nomor 00016 dan SP2D Nomor 261190000000329 sebesar Rp16.411.000.

6. DIPA APBN 2024

Rekening pemerintah yang digunakan oleh Satuan Kerja KPU Kabupaten Pakpak Bharat untuk menampung dana APBN Tahun Anggaran 2025 adalah Bank BRI. Tahun Anggaran 2025 Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat menerima DIPA Awal dengan nomor SP DIPA- 076.01.2.655991/2025 tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp2.572.494.000. Sampai dengan 31 Desember 2025 KPU Pakpak Bharat telah melaksanakan Revisi DIPA sebanyak 16 (enam belas) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Revisi	Nomor dan Tanggal DIPA	Jumlah
1	Revisi I	SP DIPA- 076.01.2.655991/2025 tanggal 21 Februari 2025	Rp 4.064.290.000
2	Revisi II	SP DIPA- 076.01.2.655991/2025 tanggal 14 Maret 2025	Rp 4.064.290.000
3	Revisi III	SP DIPA- 076.01.2.655991/2025 tanggal 15 April 2025	Rp 4.064.290.000
4	Revisi IV	SP DIPA- 076.01.2.655991/2025 tanggal 07 Mei 2025	Rp 4.024.372.000
5	Revisi V	SP DIPA- 076.01.2.655991/2025 tanggal 07 Juni 2025	Rp 4.024.372.000
6	Revisi VI	SP DIPA- 076.01.2.655991/2025 tanggal 20 Juni 2025	Rp 4.747.720.000
7	Revisi VII	SP DIPA- 076.01.2.655991/2025 tanggal 04 Juli 2025	Rp 4.747.720.000
8	Revisi VIII	SP DIPA- 076.01.2.655991/2025 tanggal 20 Agustus 2025	Rp 4.833.593.000
9	Revisi IX	SP DIPA- 076.01.2.655991/2025 tanggal 03 Oktober 2025	Rp 4.833.593.000
10	Revisi X	SP DIPA- 076.01.2.655991/2025 tanggal 02 November 2025	Rp 3.362.437.000
11	Revisi XI	SP DIPA- 076.01.2.655991/2025 tanggal 12 November 2025	Rp 3.362.437.000
12	Revisi XII	SP DIPA- 076.01.2.655991/2025 tanggal 19 November 2025	Rp 3.362.437.000
13	Revisi XIII	SP DIPA- 076.01.2.655991/2025 tanggal 24 November 2025	Rp 3.362.437.000
14	Revisi XIV	SP DIPA- 076.01.2.655991/2025 tanggal 11 Desember 2025	Rp 3.362.437.000
15	Revisi XV	SP DIPA- 076.01.2.655991/2025 tanggal 19 Januari 2026	Rp 4.647.910.000
16	Revisi XVI	SP DIPA- 076.01.2.655991/2025 tanggal 31 Desember 2025	Rp 4.647.910.000

7. Pemindahtanganan BMN

Sampai dengan 31 Desember 2025 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp15.644.494 dengan rincian sebagai berikut :

Bersumber dari Penjualan BMN berupa Persediaan Logistik Pasca Pemilu Serentak Tahun

- a. 2024 melalui Lelang dengan Risalah Lelang Nomor : 32/02.02/2025-01 tanggal 17 April 2025 Senilai Rp.14.459.494,-

Bersumber dari Penjualan BMN berupa Persediaan Logistik Pasca Pemilihan Serentak

- b. Tahun 2024 melalui Lelang dengan Risalah Lelang Nomor : 106/02.02/2025-01 tanggal 21 Agustus 2025 Senilai Rp.1.185.000,-

8. Dana Hibah

a. NPHD

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 200.1.5.2./62/1215-105/2023 dan 1107/KU.07-PKS/1215/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 sebesar Rp.16.054.890.000,- (enam belas miliar lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

b. Register Hibah

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat mengajukan Penerbitan nomor register Hibah ke Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sumatera Utara dengan surat Permohonan Nomor : 1153/KU.07-SD/1215/2023 tanggal 14 November 2023, dan mendapat Nomor Register Hibah yang disampaikan melalui Surat Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara Nomor : S-3130/WPB.02/2023 tanggal 15 November 2023 dengan nomor Register Hibah 2483N77A dan Masa Berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Kemudian Satker KPU Kabupaten Pakpak Bharat mengajukan Surat Permohonan Perbaikan Tanggal Batas Closing Date Hibah Pilkada 2024 ke Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor : 562/KU.07-SD/1215/2024 tanggal 15 Mei 2025. Sesuai Surat Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara Nomor : S-1939/WPB.02/2024 tanggal 17 Mei 2024 perihal Koreksi tanggal batas penarikan Dana Hibah yang semula 28 Februari 2025 menjadi 31 Desember 2025.

c. Izin Rekening

- Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara Kepala Kantor KPPN Sidikalang Nomor : S-955/KPN.0210/2023 tanggal 20 November 2023 dengan Nama Rekening RPL 119 PDHL KPU PB 2483N77A pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidikalang dengan Nomor Rekening 019401003646307
- Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara Kepala Kantor KPPN Sidikalang Nomor : S-319/KPN.0210/2024 tanggal 6 Mei 2024 dengan Nama Rekening RPL 119 PDH KPU PB 2483N77A pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidikalang dengan Nomor Rekening 019401003724309.

d. Pencairan Dana Hibah

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat telah menerima Pencairan Dana Hibah sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Pada tanggal 30 November 2023 Pencairan Dana Hibah Tahap I (kesatu) sebesar Rp. 6.676.964.800,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah). Pada tanggal 19 Juli 2024 KPU Pakpak Barat menerima Pencairan Dana Hibah Tahap II (kedua) sebesar Rp9.377.925.200 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima dua ratus rupiah).

e. Pengesahan Pendapatan Hibah

Pada Tahun 2024 KPU Pakpak Barat telah melaksanakan Pengesahan Pendapatan Keseluruhan Hibah yang diterima yaitu sebesar Rp16.054.890.000,- (enam belas miliar lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Pengesahan Pertama dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp. 6.676.964.800,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah). Pengesahan Kedua dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024 yaitu sebesar Rp9.377.925.200 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima dua ratus rupiah).

f. Pengesahan Belanja Hibah

Pada Tahun 2025 KPU Pakpak Bharat telah melaksanakan Pengesahan Belanja Hibah sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

SP2HL Nomor 00069 Tanggal 17 April 2025 sebesar Rp1.196.956.400 dengan Nomor SPHL Nomor : 251190600070001 tanggal 17 April 2025.

g. Penyetoran Sisa Dana Hibah

Dana Hibah KPU Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp16.054.890.000 sudah terealisasi pada tahun 2024 sebesar Rp11.184.508.292 dan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp1.196.956.400 sehingga sisa Dana Hibah sebesar Rp3.673.425.308 yang sudah di setorkan ke RKUD Kabupaten Pakpak Bharat . KPU Pakpak Bharat juga sudah melaksanakan pengesahan atas pengembalian dana tersebut dengan SP4HL Nomor 00071 tanggal 23 April 2025 dan SP3HL nomor 251190600070002 tanggal 23 April 2025.

h. Saldo Rekening Hibah

Saldo Hibah di Rekening Bendahara Pengeluaran pada 30 Juni 2025 dengan nama RPL 119 PDHL KPU PB 2483N77A pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidikalang dengan Nomor Rekening 019401003646307 sebesar Rp0 dan di Rekening Bendahar Pengeluaran Pembantu Penyaluran Dana Hibah dengan nama RPL 119 PDH KPU PB 2483N77A pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidikalang dengan Nomor Rekening 019401003724309 sebesar Rp0, kedua rekening tersebut telah ditutup pada tanggal 5 Mei 2025 dengan Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Branch Office Sidikalang Nomor : B.1527.KC.II/OPS/05/2025 tanggal 5 Mei 2025.

9. Jurnal Penyesuaian Khusus

Terdapat Jurnal Penyesuaian Khusus per 31 Desember Tahun 2025 :

- Belanja Dibayar Dimuka yaitu berupa Sewa Gudang Tahun 2025 Nomor : 530/KPA/1215/2025 tanggal 21 April 2025 Rp 22.000.000,- dengan masa sewa selama 12 bulan, terhitung mulai 1 Mei 2025 s.d 30 April 2025 sehingga pada 31 Desember 2025 terdapat Beban dibayar dimuka selama 4 bulan sebesar Rp7.333.333.
- Utang Yang Belum Dibayar yaitu berupa Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bulan Desember Tahun 2025 untuk 6 Orang yang belum dibayarkan karena Pagu Anggaran tidak mencukupi.

10. Transfer Masuk

Terdapat Transfer masuk dari KPU Kabupaten Simalungun sebesar Rp5.541.750 berupa Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp 6.157.500 atas Pembayaran Honorarium TIM Kelompok Kerja Pada Satker KPU Kabupaten Simalungun berdasarkan LHP BPK RI Tahun 2017 an. Tanggo Sintong Samosir yang di pidahkan ke KPU Kabupaten Pakpak Bharat karena yang bersangkutan sudah di mutasikan/promosi ke Satker KPU Kabupaten Pakpak Bharat, dikurang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp615.750.